

Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi

EGI DION KUSNANDAR, SADAR YUNI RAHARJO

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Nasional
Email: egidion14@mhs.itenas.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan kawasan permukiman kumuh menjadi isu utama seperti tidak pernah terselesaikan dari waktu ke waktu. Masalah kawasan permukiman kumuh juga dialami oleh Kota Bekasi, khususnya di Kecamatan Bantargebang yang di wilayahnya terdapat Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi tingkat kekumuhan dan menentukan prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh. Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif kuantitatif dimana peneliti menggambarkan fenomena, dan menyajikan fakta secara sistematis untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tingkat kekumuhan yang terjadi pada kawasan permukiman kumuh Kecamatan Bantargebang adalah tingkat kumuh ringan, serta analisis prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh menghasilkan kawasan prioritas penanganan I di Kelurahan Ciketingudik dengan prioritas perbaikan kondisi bangunan dan pemeliharaan drainase, kawasan prioritas penanganan II di Kelurahan Sumurbatu dengan prioritas penyediaan sistem pengelolaan air limbah, dan kawasan prioritas penanganan III di Kelurahan Cikiwul dengan prioritas penyediaan air perpipaan.

Kata kunci: *Identifikasi Tingkat Kekumuhan, Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh, dan Kecamatan Bantargebang*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perkotaan diartikan sebagai proses transformasi suatu kota dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya kepadatan bangunan. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya permintaan rumah yang layak huni tidak seimbang dengan ketersediaan lahan permukiman sehingga menambah berat tekanan permasalahan di perkotaan. Kondisi ini yang memaksa sebagian masyarakat perkotaan lebih memilih untuk menempati lahan permukiman yang tidak sesuai peruntukannya atau dengan menempati tempat tinggal yang tidak layak huni hingga membentuk daerah kumuh (Budiharjo,1997 dalam Anggara, 2018).

Kota Bekasi sebagai kota penyangga Kawasan Metropolitan dengan letaknya strategis menjadi kota pilihan kaum urban sebagai tempat tinggal, hal ini mendorong laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 mencapai 2,54 juta jiwa (Kota Bekasi Dalam Angka, 2021). Berjalannya waktu ini akan menjadi tantangan besar dalam penyediaan lahan kawasan permukiman. Sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi No. 600/Kep.590-DKPP/XI Tahun 2021 tentang Lokasi Permukiman Kumuh, menunjukkan bahwa total luas kawasan kumuh Kota Bekasi mencapai 365,07 Ha dengan Kecamatan Bantargebang menjadi salah satu kecamatan yang memiliki luas kawasan kumuh terluas mencapai 15,48 Ha atau sekitar 4,24 persen luas kawasan kumuh di Kota Bekasi.

2. METODOLOGI

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang dimana penelitian ini mendapatkan gambaran dari suatu permasalahan mengenai kondisi kekumuhan kawasan permukiman kumuh berdasarkan kriteria kekumuhan yang sudah ditetapkan.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara, kuesioner dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data SK Kumuh dan dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) Kota Bekasi dengan melakukan survey ke instansi terkait.

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi yang dimaksud penelitian ini merupakan jumlah unit bangunan rumah pada kawasan permukiman kumuh, yaitu sebanyak 761 unit. Besarnya sampel penelitian didasarkan pada rumus Slovin. Jumlah sampel yang didapatkan dari hasil perhitungan rumus Slovin sebesar 88 sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* homogen dengan karakteristik bangunan rumah kumuh yang sama berdekatan dengan area TPST dan TPA. Adapun sebanyak 88 sampel akan didistribusikan dengan metode pembobotan dan persentase berdasarkan jumlah bangunan. Berikut tabel distribusi sampel di setiap lokasi penelitian.

Tabel 1. Distribusi Sampel

Kelurahan	Detail Lokasi	Sampel
Cikiwul	RT004-RW004	16
Ciketingudik	RT001-RW005	21
	RT002-RW005	18
	RT003-RW005	11
Sumurbatu	RT001-RW003	10
	RT003-RW003	12
Jumlah		88

Sumber: Hasil Analisis, 2022

2.4 Metode Analisis

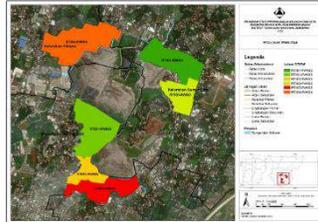
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis skoring dengan melakukan penilaian tingkat kekumuhan terhadap 7 (tujuh) kriteria kekumuhan dalam (Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang pecegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh), meliputi: (1) Kondisi Bangunan; (2) Kondisi Jalan Lingkungan; (3) Kondisi Penyediaan Air Minum; (4) Kondisi Drainase Lingkungan; (5) Kondisi Pengelolaan Air Limbah; (6) Kondisi Pengelolaan Persampahan; dan (7) Kondisi Proteksi Kebakaran.

Proses penilaian menggunakan batas ambang yang dikategorikan kedalam penilaian dengan kategori kumuh berat, kumuh sedang, kumuh ringan, dan tidak kumuh. Adapun nilai Tingkat Kekumuhan Berat 60-80, Tingkat Kekumuhan Sedang 38-59, Tingkat Kekumuhan Ringan 16-37 dan Tingkat Kekumuhan Tidak Kumuh <16.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Bantargebang

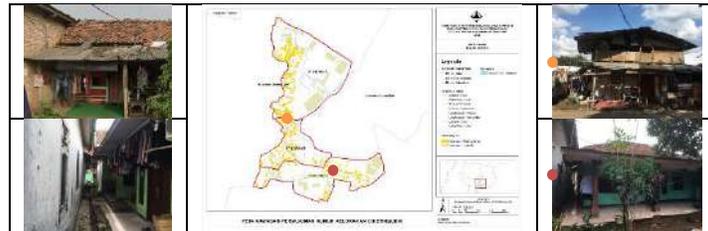
Kawasan permukiman Kumuh Kecamatan Bantargebang terletak di tiga wilayah kelurahan yang berbatasan langsung dengan TPST Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu, meliputi Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Sumber: Hasil Pengolahan, 2022

3.1.1 Kondisi Bangunan

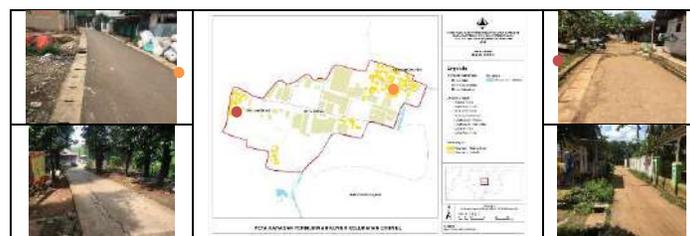
Berdasarkan hasil analisis total jumlah bangunan 1.031 unit dengan luas permukiman 24,29 Ha sehingga tingkat kepadatan bangunan 42 unit/Ha. Sedangkan kondisi bangunan yang tidak teratur dan tidak sesuai persyaratan teknis berjumlah 35 unit (40%) dari 88 unit jumlah sampel.



Gambar 2. Kondisi Bangunan
Sumber: Hasil Observasi, 2022

3.1.2 Kondisi Jalan Lingkungan

Berdasarkan hasil analisis total panjang jalan lingkungan 4.781 meter dengan kondisi jalan lingkungan dapat melayani seluruh kawasan permukiman dan telah dilakukan pengerasan berupa cor atau aspal melalui program padat karya oleh LPM/BKM.



Gambar 3. Kondisi Jalan Lingkungan
Sumber: Hasil Observasi, 2022

3.1.3 Kondisi Penyediaan Air Minum

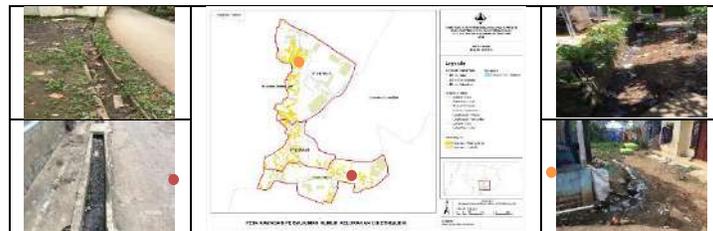
Berdasarkan hasil analisis total jumlah kepala keluarga 1.271 KK sudah mengakses sumber air bersih dan berkualitas melalui program sumur artesis, namun belum terpenuhi kebutuhan air minimalnya karena belum optimalnya waktu pelayanan sumur artesis sehingga perlu ditambah dengan sumur bor/pompa pribadi.



Gambar 4. Kondisi Jalan Penyediaan Air Minum
Sumber: Hasil Observasi, 2022

3.1.3 Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan hasil analisis total panjang drainase lingkungan 4.763 meter dengan kondisi drainase lingkungan sudah tersedia di seluruh kawasan permukiman, namun terdapat kondisi drainase lingkungan yang rusak dan tidak terpelihara sehingga terjadi penyumbatan dan sedimentasi dengan panjang keseluruhan 3.300 meter.



Gambar 5. Kondisi Drainase Lingkungan
Sumber: Hasil Observasi, 2022

3.1.4 Kondisi Pengelolaan Air Limbah

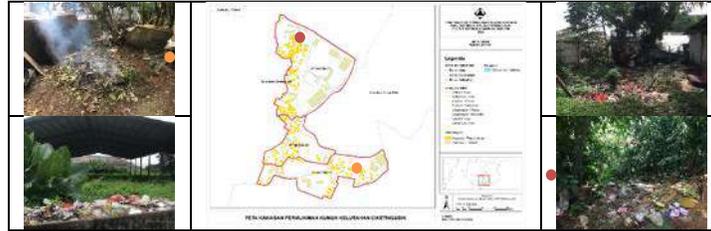
Berdasarkan hasil analisis terdapat 10 KK pada RT 1 dan RT 03 RW 03 di Kelurahan Sumurbatu yang tidak memiliki jenis kloset terhubung dengan *septic tank* individu/komunal atau masih menggunakan kolam penampungan air dari 1.271 KK keseluruhan.



Gambar 6. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
Sumber: Hasil Observasi, 2022

3.1.5 Kondisi Pengelolaan Persampahan

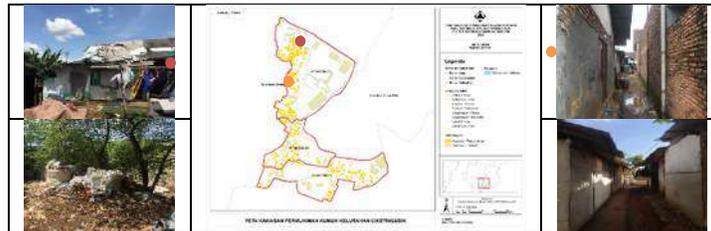
Berdasarkan hasil analisis sebanyak 1.271 KK keseluruhan belum memiliki prasarana dan sarana, serta sistem persampahan. Pada umumnya masyarakat membuang sampah sembarangan di lahan kosong dan membakar sampah di area permukiman.



Gambar 7. Kondisi Pengelolaan Persampahan
Sumber: Hasil Observasi, 2022

3.1.6 Kondisi Proteksi Kebakaran

Berdasarkan hasil analisis sebanyak 1.031 unit bangunan belum memiliki sarana proteksi kebakaran seperti APAR, namun seluruh bangunan di kawasan permukiman sudah memiliki prasarana proteksi kebakaran seperti jalan lingkungan.



Gambar 8. Kondisi Proteksi Kebakaran
Sumber: Hasil Observasi, 2022

3.2 Penilaian Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan hasil analisis tingkat kekumuhan Kecamatan Bantargebang termasuk dalam tingkat kumuh ringan. Kelurahan Cikiwul dengan total nilai kekumuhan terendah 23. Kelurahan Sumurbatu dengan total nilai tingkat kekumuhan yaitu 25. Kelurahan Ciketingudik dengan total nilai tingkat kekumuhan tertinggi mencapai 27.

Tabel 2. Penilaian Tingkat Kekumuhan

Kriteria	Indikator	Nilai Kekumuhan		
		Cikiwul	Ciketingudik	Sumurbatu
Bangunan	Ketlaksanaan Bangunan	1	0	0
	Tingkat Kepadatan Bangunan	0	0	0
	Ketlaksanaan dengan Persyaratan Teknis	1	1	1
Jalan Lingkungan	Cangkupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0	0	0
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	0	0	0
Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Jarak Air Minum	0	0	0
	Tidak Terperuhinya Kebutuhan Air Minum	5	5	5
Drainase Lingkungan	Ketersediaan Drainase Lingkungan	0	0	0
	Ketertinggalan Drainase Lingkungan Mengalirkan Air	0	0	0
Pengolahan Air Limbah	Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan	1	5	3
	Sistem Pengolahan Air Limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	0	0	0
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	0	0	0
Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	5	5	5
	Sistem Pengelolaan Persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	5	5	5
Proteksi Kebakaran	Ketlaksanaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0	0	0
	Ketlaksanaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	5	5
Total		23	27	25
Kategori		KR	KR	KR

Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.3 Penentuan Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

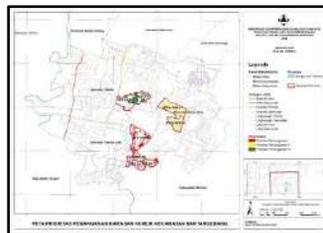
Penentuan prioritas penanganan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan tingkat kekumuhan di atas dan ditambah dengan penentuan kriteria kekumuhan.

Tabel 3. Penentuan Kriteria Kekumuhan

No.	Kriteria Kekumuhan	Nilai Kekumuhan			Jumlah
		Cikiwul	Ciketingudik	Sumurbatu	
1.	Kondisi Bangunan	1,0,1	1,0,1	1,0,1	6
2.	Jalan Lingkungan	0,0	0,0	0,0	0
3.	Penyediaan Air Minum	0,5	0,5	0,5	15
4.	Drainase Lingkungan	0,0,1	0,0,5	0,0,3	9
5.	Pengelolaan Air Limbah	0,0	0,0	0,0	0
6.	Pengelolaan Persampahan	5,5	5,5	5,5	30
7.	Proteksi Kebakaran	0,5	0,5	0,5	15

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Kriteria kekumuhan tertinggi pada kondisi pengelolaan persampahan. Kemudian lokasi kawasan permukiman kumuh diklasifikasikan dalam tiga kawasan prioritas penanganan, yang diantaranya kawasan prioritas penanganan I Kelurahan Ciketingudik, kawasan prioritas penanganan II Kelurahan Sumurbatu dan kawasan prioritas penanganan III Kelurahan Cikiwul.



Gambar 9. Peta Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4. KESIMPULAN

Tingkat kekumuhan yang terjadi di Kecamatan Bantargebang termasuk dalam kategori kumuh ringan. Kelurahan Ciketingudik dengan nilai kumuh 27 sebagai kawasan prioritas penanganan I dengan prioritas penanganan pemugaran bangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan pemeliharaan drainase, Kelurahan Sumurbatu dengan nilai kumuh 25 sebagai kawasan prioritas penanganan II dengan prioritas penanganan penyediaan *septictank* komunal/individu, Kelurahan Cikiwul dengan nilai kumuh 23 sebagai kawasan prioritas penanganan III dengan prioritas penanganan penyediaan air perpipaan, serta secara menyeluruh diperlukan penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran dan sistem pengelolaan persampahan dengan konsep TPS 3R.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggara, V. (2018). Analisis Tingkat Kekumuhan dan Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.
BPS. Kota Bekasi Dalam Angka 2021.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh.